

PENGARUH KOMPETENSI SUMBER DAYA MANUSIA DAN SISTEM INFORMASI PEMERINTAH DAERAH (SIPD) TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN

Renta HR Siregar¹⁾, Nurlinda²⁾, Rini Indahwati³⁾

¹²³Magister Terapan Sistem Informasi Akuntansi, Politeknik Negeri Medan

email: ¹ rentaherawatisiregar1@gmail.com, ² nurlinda@polmed.ac.id, ³ riniindahwati@polmed.ac.id

Abstrak

[Times New Roman 11 Cetak Tebal dan Miring] tepi kiri (Bhs. Inggris & Indonesia)

The aim of this research is to find out how the role of human resource competence and the implementation of regional government information systems influence the quality of financial reports in the Sibolga City. This research was conducted at the Sibolga City Government Regional Apparatus Organization. The research method used in this research is a quantitative research method using a descriptive and verification approach. The sampling technique used in this research was probability sampling, namely 37 Sibolga City Regional Apparatus Organizations. The research target population was the Head of Planning and/or Finance Subdivision, Financial Administration Staff and Expenditure Treasurer in each Regional Apparatus, so the total sample was 74 respondents. The data collection method was carried out using a questionnaire. multiple regression analysis using the SPSS version 22 program. The results of the research show that human resource competence and the application of local government information systems have a positive effect on the quality of Sibolga city government financial reports.

Keywords: *Human Resource Competence, Implementation of Regional Government Information Systems, Quality of financial reports*

Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pengaruh peran kompetensi sumber daya manusia dan penerapan sistem informasi pemerintah daerah terhadap kualitas laporan keuangan di pemerintah Kota Sibolga. Penelitian ini dilakukan pada Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kota Sibolga. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kuantitatif dengan menggunakan pendekatan deskriptif dan verifikatif. Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah probability sampling yakni 37 Organisasi Perangkat Daerah Kota Sibolga. Populasi target penelitian adalah Kasubbag Perencanaan dan atau Keuangan, Staf Penatausahaan Keuangan dan Bendahara Pengeluaran di masing-masing Perangkat Daerah, sehingga jumlah sampel menjadi 74 responden. Metode pengumpulan data dilakukan dengan kuesioner. analisis regresi berganda dengan menggunakan program SPSS versi 22. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kompetensi sumber daya manusia dan penerapan sistem informasi pemerintah daerah berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah kota Sibolga.

Kata Kunci : *Kompetensi Sumber Daya Manusia, Penerapan Sistem informasi Pemerintah, Kualitas Laporan keuangan*

PENDAHULUAN

Fenomena laporan keuangan pemerintah daerah di Indonesia merupakan suatu hal yang menarik untuk dikaji. Ketertarikan ini muncul karena hingga saat ini, di dalam laporan keuangan pemerintah masih banyak disajikan data yang tidak sesuai, dimana masih banyak penyimpangan-penyimpangan yang berhasil ditemukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) pada tahun 2022 dalam pelaksanaan audit laporan keuangan pemerintah. Penyimpangan-penyimpangan yang dimaksud tersebut seperti pertanggungjawaban belanja yang tidak lengkap dan tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya, realisasi belanja perjalanan dinas yang tidak sesuai ketentuan, volume pekerjaan fisik yang tidak sesuai ketentuan, dan masih ditemukannya aset negara yang dikuasai pihak lain. Fenomena-fenomena tersebut, membuat tuntutan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintah yang baik (*good governance*) meningkat. Hal ini mendorong pemerintah pusat hingga daerah untuk memperbaiki sistem pengelolaan keuangan negara dan aspek-aspek pendukungnya.

Laporan keuangan pemerintah yang dihasilkan harus memenuhi Standar Akuntansi Pemerintah sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 yang telah direvisi dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010. Laporan keuangan yang dikatakan berkualitas apabila informasi yang disajikan di dalam laporan keuangan dapat dipahami, bebas dari pengertian yang menyesatkan dan kesalahan yang material, menyajikan fakta secara jujur serta dapat diverifikasi (BPK, 2010).

Laporan keuangan yang berkualitas tidak terlepas dari sumber daya handal yang memiliki kompetensi yang berkualitas. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian Faisal & Sari dalam menyatakan bahwa semakin kompeten atau semakin

baik SDM yang terlibat maka semakin baik kualitas laporan keuangan yang dihasilkan, tepat waktu, releva dan dapat dibandingkan (Yusuf Faisal, 2023).

Kompetensi adalah karakteristik dan kemampuan kerja yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap sesuai tugas dan/atau fungsi jabatan (BPK, 2013). Kompetensi dapat dipandang sebagai atribut yang spesifik seperti pengetahuan, kemampuan serta keterampilan yang digunakan untuk menunjukkan suatu kinerja dalam suatu pekerjaan untuk menyelesaikan tugas tertentu yang dilakukan oleh seseorang (Subagyo Dr, 2020)

Menurut Spencer dalam Sudarmanto (2015) terdapat 5 (lima) komponen Kompetensi adalah: 1. *Skills* (keterampilan), *Motive* (tujuan atau motivasi), *Traits* (karakteristik pribadi/watak), *Self Concept/attitude* (konsep diri/sikap), *Knowledge* (pengetahuan).

Selain Sumber Daya Manusia (SDM) dalam penyusunan laporan keuangan terdapat perangkat sistem informasi yang digunakan. Dikeluarkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No. 77, Tahun 2020 yang menggantikan Permendagri sebelumnya, Permendagri No. 13, Tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah (BPK, 2020). Dan seluruh OPD Kota Sibolga sudah tidak menggunakan aplikasi SIMDA (Sistem Informasi Manajemen Daerah) lagi, melainkan untuk sekarang ini menggunakan aplikasi SIPD (Sistem Informasi Pemerintah Daerah) yang diatur dalam Permendagri No. 70, Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (BPK, 2019). Anggaran memiliki fungsi sebagai alat perencanaan dan sebagai alat pengendalian. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan sumber pendanaan yang digunakan oleh pemerintah dalam menjalankan roda pemerintahan.

Dalam rangka penyelenggaraan pengelolaan keuangan daerah yang transparan dan bertanggung jawab, pemerintah memanfaatkan perkembangan teknologi yang saat ini berkembang sangat pesat yaitu teknologi di bidang keuangan khususnya Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD). Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) dapat dimanfaatkan oleh pemerintahan Provinsi, Kabupaten/Kota maupun Kecamatan baik ditingkat pelaporan maupun ditingkat akuntansi, untuk mendorong tercapainya akuntabilitas yang diharapkan, sehingga guna mendukung hal tersebut diterbitkanlah teknologi *software* SIPD.

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70, Tahun 2019, Tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) menjelaskan bahwa SIPD adalah pengelolaan informasi pembangunan daerah, informasi keuangan daerah, dan informasi pemerintahan daerah lainnya yang saling terhubung untuk dimanfaatkan dalam penyelenggaraan pembangunan daerah. Putri (2021) menjelaskan bahwa Ruang lingkup Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) meliputi, informasi pembangunan daerah, informasi keuangan daerah, dan informasi pemerintahan daerah lainnya (Vitriana, Nidya, 2022). Menurut Dione dan Utami (2020) sistem informasi SIPD dapat digunakan untuk mendukung integrasi pemanfaatan data terkait dengan perkembangan pembangunan pada masing-masing instansi pemerintah (Dione, 2020).

Selain itu, fungsi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) sebagai media akuntabilitas publik yang memungkinkan masyarakat mengevaluasi kinerja pemerintah, mengevaluasi program-program pembangunan, dan sekaligus mengevaluasi capaian-capaian pembangunan. Berdasarkan pengertian Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) yang telah diuraikan tersebut dapat disimpulkan, bahwa Sistem Informasi

Pemerintahan Daerah (SIPD) merupakan sistem informasi yang dapat membantu dalam penyusunan perencanaan, pengendalian, evaluasi data dan informasi pembangunan daerah secara elektronik yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah secara nasional. Memiliki fungsi sebagai jejaring dalam pengumpulan data secara terpadu, *real time* dan *online* di pusat dan daerah dengan menggunakan teknologi informasi, sebagai dukungan dalam perencanaan program dan kegiatan serta evaluasi pembangunan daerah secara rasional, efektif dan efisien.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70, Tahun 2019 menjelaskan bahwa tujuan pelaksanaan SIPD adalah:

1. Meningkatkan kualitas perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, melalui dukungan ketersediaan data dan informasi pembangunan daerah yang akurat, mutakhir dan dapat dipertanggungjawabkan.
2. Membangun rumah legal database pembangunan untuk seluruh daerah, sebagai dasar input untuk perencanaan pembangunan baik pusat maupun daerah.
3. Dan berguna untuk instrument pengelolan data dan informasi dan evaluasi capaian perperiode.
4. Dan instrument analisis isu-isu strategis dan analisis gambaran umum kondisi daerah dan ekonomi dan keuangan daerah.

Berdasarkan hal tersebut di atas maka peneliti memandang pentingnya kualitas laporan keuangan yang baik didukung dari sumber daya manusia dan sistem informasi pemerintah daerah. Keadaan ini juga didukung dari hasil penelitian Iman Nur Hakim (2018) menjelaskan bahwa terdapat pengaruh dari Kompetensi Sumber Daya Manusia terdapat hubungan yang berbanding lurus antara penerapan sistem informasi

manajemen keuangan daerah terhadap Kualitas laporan keuangan daerah pada SKPD di Wilayah Kabupaten Bandung. Selain itu juga berikut penjas dari beberapa hasil penelitian sebelumnya yang mendukung penelitian ini dilakukan di Kota Sibolga :

1. Lilis Rosida (2019) : Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem pengendalian internal, kompetensi sumber daya manusia dan komitmen organisasi secara parsial dan simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah (Rosida, 2021).
2. Nosvawati Nune (2016): Hasil penelitian menunjukkan bahwa kompetensi sumber daya manusia dan penerapan sistem informasi manajemen daerah berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pada Dinas Kesehatan Kota Gorontalo secara parsial dan simultan (Nune, 2016).
3. Dewi Andini (2015) : Hasil penelitian menunjukkan bahwa kompetensi SDM dan penerapan sistem akuntansi keuangan daerah berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan daerah pada SKPD Kabupaten Empat Lawang (Andini & Yusrawati, 2016).
4. Bayu Dharma Putra (2015): a) Variabel kompetensi SDM berpengaruh langsung sebesar 8,12%, b) Variabel penerapan SAP berpengaruh langsung sebesar 4,84%, c) Variabel penerapan SPIP berpengaruh tidak langsung sebesar 2,44% (Putra & Amar, 20015).
5. Hairul Mohamad (2014): Hasil penelitian menunjukan bahwa kualitas Sumber Daya Manusia dan penerapan teknologi sistem informasi manajemen keuangan daerah secara parsial maupun simultan berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan (Mohamad & Dkk, 2014).

Selain hal tersebut di atas peneliti juga menginformasikan bahwa Pemerintah Kota Sibolga telah mendapatkan opini

Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) walaupun dengan catatan dalam dua tahun terakhir. Berdasarkan pemeriksaan yang dilakukan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia tahun 2024 Kota Sibolga memperoleh opini WDP (Wajar Dengan Pengecualian) yang dimana mengalami penurunan grade dari tahun-tahun sebelumnya. Dikarenakan tiga tahun berturut-turut memperoleh opini WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) yakni dari tahun 2020 sampai 2023.

Walaupun Kota Sibolga telah memperoleh opini WTP, namun belum menggambarkan bahwa laporan keuangan yang disajikan sudah baik. BPK masih memberikan catatan-catatan terhadap laporan dimaksud seperti adanya kesalahan administrasi, ketidakpahaman dalam penginputan data ke dalam aplikasi. Kesalahan pada penginputan data ke dalam aplikasi menggambarkan Sumber Daya manusia (SDM) yang tidak mampu menyusun laporan keuangan padahal telah diberi pelatihan. Catatan lain pada hasil pemeriksaan BPK terhadap laporan keuangan Pemerintah Kota Sibolga adalah laporan yang tidak disajikan tepat waktu. Laporan keuangan Pemerintah Kota Sibolga masih sering terlambat dalam penyajiannya. Selain itu, terkadang laporan keuangan yang disajikan pun belum lengkap yang disebabkan oleh beberapa bagian yang belum selesai proses penginputan dan pengumpulan datanya.

Keadaan ini diduga akibat rendahnya kompetensi sumber daya manusia aparatur penyusun laporan keuangan di lingkungan Pemerintah Kota Sibolga. Hal ini dilihat dari fenomena bahwa tidak semua sumber daya aparatur pengelola keuangan di lingkungan Pemerintah Kota Sibolga memiliki latar belakang pendidikan D3/S1 akuntansi, dan tidak semua sumber daya aparatur tersebut pernah mendapatkan pendidikan dan pelatihan penyusunan laporan keuangan.

Dengan keadaan yang telah dijelaskan di atas, maka peneliti tertarik melakukan penelitian tentang “Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia dan Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) terhadap kualitas laporan keuangan”.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kuantitatif dengan menggunakan pendekatan deskriptif dan verifikatif dengan variabel independen: kompetensi sumber daya manusia (Sikap Perilaku, Pengetahuan, Keterampilan) dan Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Akses, Portal, Organisasi pengelolaan dan pengolahan informasi, Infrastruktur dan aplikasi dasar semua prasarana). Variable dependen: kualitas laporan keuangan daerah (indikator: Relevan, Andal, Dapat dibandingkan, Dapat dipahami). Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah probability sampling Populasi, jumlah sampel 74 responden yaitu pegawai yang bekerja pada bagian akuntansi atau keuangan dan terlibat dalam penyusunan laporan keuangan melalui teknik pengumpulan data pengisian kuesioner dan analisis data regresi liner berganda.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dari hasil penelitian diperoleh data karakteristik responde yaitu:

Tabel 1. Karakteristik Responden

Keterangan	Frekuensi	Presentase (%)
Jenis Kelamin		
Laki-laki	36	48,65%
Perempuan	38	51,35%
Usia		
≤ 25 tahun	3	4,05%
26-35 tahun	20	27,03%
36-50 tahun	51	68,92%
≥ 51 tahun	0	0%
Pendidikan		
SMA/SMK	2	2,70%
D3	4	5,41%

S1	65	87,84%
S2	3	4,05%
S3	0	0,00%
Latar Belakang Pendidikan		
Akuntansi	8	10,81%
Manajemen	15	20,27%
Sosial	0	0%
Lainnya	51	68,92%
Lama Bekerja		
1-5 tahun	3	4,05%
6-10 tahun	27	36,49%
11-20 tahun	44	59,46%
≥ 21 tahun	0	0%

Pada tabel di atas dapat tergambar bahwa karakteristik responden 51,35% pegawai perempuan yang bertugas di bagian akuntansi atau keuangan dan turut terlibat dalam penyusunan laporan keuangan dan laki-laki sebanyak 48,65%. Rata-rata usia pegawai akuntansi/keuangan berkisar 36-50 tahun (68,92%), pendidikan terbanyak adalah S1 (87,84%), Latar belakang pendidikan terbanyak pada jenis pendidikan di luar akuntansi, manajemen dan sosial. Lama bekerja pegawai akuntansi/keuangan rata-rata terbanyak pada 11-20 tahun masa kerja.

Berdasarkan hasil perhitungan Analisis Regresi Berganda Coefficientsa diperoleh pengaruh kompetensi sumber daya manusia dan Sistem Informasi Pemerintah Daerah terhadap kualitas laporan keuangan daerah adalah $Y = b_0 + b_1X^1 + b_2X^2 + e$ dengan nilai $b^0 = 5,520$; $b^1 = 0,432$ dan $b^2 = 0,586$. Rumus ini dapat menjelaskan bahwa jika kompetensi sumber daya manusia (X^1) dan Sistem Informasi Pemerintah Daerah (X^2) bernilai nol maka kualitas laporan keuangan daerah (Y) sebesar 5,520. $b^1 = 0,432$ artinya jika kompetensi sumber daya manusia (X^1) meningkat sebesar (satu) satuan variabel, Sistem Informasi Pemerintah Daerah (X^2) konstan (benilai 0), maka kualitas laporan keuangan daerah (Y) akan meningkat sebesar 0,432. Koefisien bernilai positif artinya antara variabel kompetensi sumber

daya manusia dan kualitas laporan keuangan daerah memiliki hubungan yang positif. $b^2 = 0,586$ artinya jika penerapan Sistem Informasi Pemerintah Daerah (X^2) meningkat sebesar (satu) satuan variabel, kompetensi sumber daya manusia (X^1) konstan (benilai 0), maka Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Y) akan meningkat sebesar sebesar 0,586. Koefisien bernilai positif artinya antara variabel Sistem Informasi Pemerintah Daerah dan kualitas laporan keuangan daerah memiliki hubungan yang positif.

Pengaruh Peran Kompetensi Sumber Daya Manusia Secara Parsial Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis diperoleh nilai t_{hitung} untuk variabel kompetensi sumber daya manusia sebesar 4,668 dan t^{Tabel} sebesar 1,993. Dikarenakan nilai $t_{hitung} > t^{Tabel}$ maka H_0 ditolak dan H_a diterima. Nilai signifikan menunjukkan angka positif yaitu $0,000 < 0,05$ maka H_a diterima. Nilai koefisien regresi menunjukkan angka positif sebesar 0,432. Artinya kompetensi sumber daya manusia secara parsial berpengaruh positif sebesar 43,2% terhadap kualitas laporan keuangan daerah.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 Tentang Pendidikan Dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil untuk mewujudkan pemerintahan yang baik diperlukan sumber daya manusia aparatur yang memiliki kompetensi jabatan dalam penyelenggaraan negara dan pembangunan; akuntan sebagai pembuat laporan keuangan memiliki kontribusi terhadap kualitas informasi pada laporan keuangan tersebut. Seorang akuntan yang memiliki kompetensi akan mampu menyajikan laporan keuangan yang berkualitas.

Hasil penelitian ini sejalan dengan peneliti terdahulu Rosida (2019) bahwa kompetensi sumber daya manusia

berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah yang dihasilkan, hal ini dikarenakan adanya kompetensi yang baik dan unggul, yang dimiliki oleh sumber daya manusia di masing-masing Organisasi Perangkat Daerah akan lebih mempermudah dalam pengolahan data keuangan sehingga laporan keuangan yang dihasilkan akan memiliki kualitas laporan yang baik yaitu yang relevan, andal, dapat dibandingkan dan dapat dipahami oleh semua pengguna laporan keuangan. Sejalan juga dengan penelitian yang dilakukan Kuncoro (2017) menyatakan bahwa kompetensi sumber daya manusia memiliki pengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah (Kuncoro, 2017). Hal ini menunjukkan bahwa dengan kompetensi yang baik dari para pegawai yang ada di pemerintah daerah, khususnya bagian keuangan akan menghasilkan kinerja yang baik juga dalam hal ini berbentuk laporan keuangan pemerintah daerah yang berkualitas. Jadi kompetensi sumber daya manusia memiliki pengaruh terhadap kualitas laporan keuangan daerah hal ini dikarenakan adanya kompetensi yang tinggi yang dimiliki oleh sumber daya manusia pemerintah daerah Kota Sibolga. Dengan kompetensi yang tinggi maka akan memiliki kinerja yang tinggi pula dan menghasilkan laporan keuangan daerah yang berkualitas yaitu yang relevan, andal, dapat dibandingkan dan dapat dipahami oleh seluruh pengguna laporan keuangan daerah.

Pengaruh Penerapan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Secara Parsial Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis diperoleh nilai t_{hitung} untuk variabel penerapan Sistem Informasi Pemerintah Daerah sebesar 4,210 dan t^{Tabel} sebesar 1,993. Dikarenakan nilai $t_{hitung} >$

t_{Tabel} maka H^0 ditolak dan H^a diterima. Nilai signifikan menunjukkan angka positif yaitu $0,001 < 0,05$ maka H^a diterima. Nilai koefisien regresi menunjukkan angka positif sebesar 0,586. Artinya Sistem Informasi Pemerintah Daerah secara parsial berpengaruh positif sebesar 58,6% terhadap kualitas laporan keuangan daerah. Hal ini menunjukkan bahwa Sistem Informasi Pemerintah Daerah berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. Dengan demikian para pengelola keuangan di tingkat Organisasi Perangkat Daerah (OPD) pada pemerintah daerah Kota Sibolga semakin terbantu. Penyusunan laporan keuangan yang dilakukan oleh pemerintah daerah untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan daerah. Untuk menghasilkan laporan keuangan yang cepat, tepat, dan akurat maka diperlukannya sistem yang dapat diandalkan yang dimana mampu mengolah data dan menghasilkan informasi yang tepat bagi para pengguna laporan keuangan daerah. Dengan demikian Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) mengembangkan sistem aplikasi komputer yang dapat mengolah data atas transaksi keuangan menjadi laporan keuangan daerah yaitu berupa Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD).

Hasil penelitian ini sejalan dengan peneliti terdahulu Nune (2016) yang menyatakan bahwa penerapan sistem informasi manajemen daerah terdapat pengaruh secara parsial terhadap Kualitas Laporan Keuangan pada Dinas Kesehatan Kota Gorontalo. Begitu pula penelitian yang dilakukan Kuncoro, U. (2017) menyatakan penerapan sistem informasi manajemen daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah daerah. Begitu pula penelitian yang dilakukan Gunadi (2017) hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) berpengaruh secara

signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Gowa (Gunadi, 2017).

Pengaruh Peran Kompetensi Sumber Daya Manusia dan Penerapan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Secara Simultan Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis diperoleh nilai F_{hitung} (38,105) > F_{Tabel} (3,12) dan nilai signifikan adalah 0,000 nilai ini lebih kecil dari significance level 0,05 (5%) yaitu $0,000 < 0,05$. Maka dapat disimpulkan bahwa H^0 ditolak dan H^a diterima, yang berarti Pengaruh kompetensi sumber daya manusia dan Sistem Informasi Pemerintah Daerah berpengaruh signifikan secara simultan terhadap kualitas laporan keuangan daerah. Diketahui nilai R_{square} atau koefisien determinasi adalah 0,518 yang menunjukkan bahwa kompetensi sumber daya manusia dan penerapan Sistem Informasi Pemerintah Daerah secara bersama-sama memberikan kontribusi atau pengaruh sebesar 51,8%. terhadap kualitas laporan keuangan daerah, sedangkan 48,2% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dimasukkan kedalam penelitian ini. Kompetensi sumber daya manusia dan Sistem Informasi Pemerintah Daerah secara bersama-sama memiliki pengaruh terhadap kualitas laporan keuangan daerah. Hal ini dikarenakan kompetensi sumber daya manusia yakni Perilaku, Pengetahuan, serta keterampilan.

Penerapan Sistem Informasi Pemerintah Daerah yakni Akses, Portal dan pelayanan publik, Organisasi pengelolaan dan pengolahan informasi, serta infrastruktur dan aplikasi dasar akan mempermudah proses pengolahan data keuangan. Dan laporan keuangan yang dihasilkan akan berkualitas yakni relevan, andal, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami oleh pengguna laporan keuangan. Hasil penelitian ini sejalan dengan peneliti terdahulu Hairul Mohamad (2014) yang

berjudul Pengaruh Kualitas Sumber Daya Manusia dan Penerapan Teknologi Sistem Manajemen Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Pemerintah Kota Gorontalo yang menyatakan bahwa bahwa kualitas Sumber Daya Manusia dan penerapan teknologi sistem informasi manajemen keuangan daerah secara parsial maupun simultan berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pengujian hipotesis yang telah dilakukan maka hasil penelitian dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Terdapat pengaruh positif variabel Kompetensi Sumber Daya Manusia terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah secara parsial.
2. Terdapat pengaruh positif variabel Penerapan Sistem Informasi Pemerintah Daerah terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah secara parsial.
3. Terdapat pengaruh positif variabel Kompetensi Sumber Daya Manusia dan variabel Penerapan Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah secara simultan.

SARAN

Saran yang dapat diberikan berdasarkan hasil penelitian sebagai berikut :

1. Pemerintah Kota Sibolga sebaiknya mengadakan pelatihan secara berkala untuk menambah pengetahuan para pegawai bagian akuntansi atau keuangan. Karena dalam mengelola keuangan haruslah memiliki pengetahuan dan keterampilan di bidang akuntansi sehingga dapat meningkatkan pengelolaan keuangan dan penyusunan laporan keuangan daerah.

2. Laporan keuangan pemerintah Kota Sibolga harus dapat diakses oleh semua pegawai di semua Organisasi Perangkat Daerah bukan hanya bisa diakses oleh pegawai yang berada pada bagian akuntansi atau keuangan saja.
3. Bagi peneliti selanjutnya yang tertarik dan akan melakukan penelitian dengan mengambil penelitian yang sama atau tema yang sama, disarankan dapat menguji variabel-variabel lain yang berhubungan dengan kualitas laporan keuangan daerah dengan cara menambah variabel lain atau menggunakan variabel yang berbeda dengan variabel dalam penelitian ini misalnya pemanfaatan teknologi informasi, penerapan standar akuntansi, pengendalian intern. Selain itu peneliti selanjutnya di harapkan dapat memperluas populasi dan memperbanyak sampel dan bisa meneliti di lokasi atau unit analisis yang berbeda untuk membandingkan hasil penelitian selanjutnya dengan penelitian terdahulu.

DAFTAR PUSTAKA

- Andini, D., & Yusrawati. (2016). Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia dan Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Empat Lawang Sumatera Selatan. *Jurnal Ekonomi KIAT*, 26(1), 33–41.
- BPK. (2010). Peraturan Pemerintah RI No. 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintah. In *Peraturan Pemerintah RI No. 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintah*. Cambridge University Press. <https://doi.org/10.1088/1751-8113/44/8/085201>
- BPK. (2013). Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara No. 7 Tahun 2013

- Tentang Pedoman Penyusunan Standar Kompetensi Manajerial Pegawai Negeri Sipil. In *Badan Kepegawaian Negara: Vol. PERKA NO 7*.
- BPK. (2019). Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah. In *Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia: Vol. Nomor 65*.
- BPK. (2020). Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah. In *Permendagri No 77 Tahun 2020*.
- Dione, F. (2020). Implementasi Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) Dalam Meningkatkan Koordinasi Pembangunan di Daerah. *Jurnal Kebijakan Pemerintahan*, 3(1), 21–28.
<https://doi.org/10.33701/jkp.v3i1.1061>
- Gunadi, E. (2017). Pengaruh Penerapan Sistem Informasi Manajemen Keuangan Daerah (SIMDA) Terhadap Kualitas laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Gowa (Studi Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Gowa) [Universitas Islam Negeri Alauddin Makasar]. In *Skripsi*.
<http://repositori.uin-alauddin.ac.id/id/eprint/13058>
- Kuncoro, U. (2017). *Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia Dan Penerapan Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*. Universitas Lampung.
- Mohamad, H., & Dkk. (2014). *Pengaruh Kualitas Sumber Daya Manusia, Dan Penerapan Teknologi Sistem Informasi Manajemen Keuangan Daerah (SIMDA) Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Gorontalo* [Universitas Negeri Gorontalo].
<https://rama.kemdikbud.go.id/document/detail/oai:repository.ung.ac.id:921410>
- 156-6-46
- Nune, N. (2016). *Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia dan Penerapan Sistem* (Issue 112) [Universitas Negeri Gorontalo].
<https://repository.ung.ac.id/skripsi/show/921411078/pengaruh-kompetensi-sumber-daya-manusia-dan-penerapan-sistem-informasi-manajemen-daerah-terhadap-kualitas-laporan-keuangan-pada-dinas-kesehatan-kota-gorontalo.html>
- Putra, B. D., & Amar, S. (2015). Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Dan Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Padang. *Jurnal Riset Manajemen Bisnis Dan Publik*, 3(1), 17–19.
<https://ejournal.unp.ac.id/index.php/jrmbp/article/view/5373>
- Rosida, L. (2021). *Pengaruh Sistem Pengendalian Internal, Kompetensi Sumber Daya Manusia Dan Komitmen Organisasi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah* [STIE Ekuitas].
<http://repository.ekuitas.ac.id/handle/123456789/1253?show=full>
- Subagyo Dr, M. M. (2020). *Meningkatkan Daya Saing dan Kinerja UMKM Tinjauan dari perspektif Karakter, Pembelajaran dan Kompetensi Wirausahawan* (Issue 112).
- Vitriana, Nidya, D. (2022). Analisis Penerapan Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) Pada Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah (BPKAD) Pekanbaru Analysis of the Application of the Local Government Information System (SIPD) at the Pekanbaru Regional Financial and Asset Manage. *DIGIBIS: Digital Business Journal*, 1(1), 1–16.
<http://jurnal.umt.ac.id/index.php/digibis>
- Yusuf Faisal, D. (2023). Pengaruh



Kompetensi Sumber Daya Manusia
Dan Sistem Informasi Akuntansi
Terhadap Kualitas Laporan Keuangan.
Maneksi, 12(1), 176–185.